

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA****(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2026/Khusus - Awal Menjabat)****Status Verifikasi Administratif Lengkap****BIDANG : EKSEKUTIF****LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG****UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **NUR KANAAH**
2. Jabatan : **WAKIL BUPATI**
3. NHK : **691925**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.340.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/210 m2 di KAB / KOTA SIDENRENG RAPPANG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah Seluas 1.215 m2 di KAB / KOTA SIDENRENG RAPPANG, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
3. Tanah Seluas 1.215 m2 di KAB / KOTA SIDENRENG RAPPANG, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1.800 m2/1.800 m2 di KAB / KOTA SIDENRENG RAPPANG, HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 238.000.000

1. MOTOR, HONDA NC110 D AT (VARIO) Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER 1.5L ULTIMATE Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
3. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 123.400.000**D. SURAT BERHARGA Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 551.846.712****F. HARTA LAINNYA Rp. ----****Sub Total Rp. 2.253.246.712**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.253.246.712

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.